



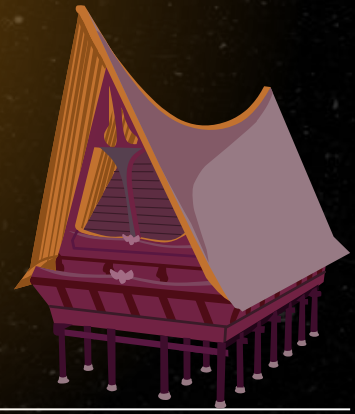
# InAng Cestar

**Informasi APBN yang Cepat, Transparan, Responsif**

*Menjaga yang Tak Terlihat, Mengawal yang Bermakna*

Edisi II | Tahun 2025

# Selayang Pandang



Dengan memanjatkan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pematang Siantar berhasil menerbitkan Buletin Inang Cetar Edisi II 2025.

Buletin ini disusun sebagai bentuk sarana atau media publikasi informasi, komunikasi, dan edukasi dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pematang Siantar kepada seluruh mitra KPPN Pematang Siantar dan juga seluruh masyarakat Kota Pematangsiantar dan Kabupaten Simalungun terkait perkembangan kinerja keuangan atas pengelolaan APBN yang dilakukan oleh KPPN Pematang Siantar.

Buletin Inang Cetar Edisi II kali ini memuat *timeline* kegiatan KPPN Pematang Siantar sepanjang triwulan II tahun 2025 serta informasi realisasi APBN periode sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 yang disalurkan oleh KPPN Pematang Siantar. Selain itu, edisi kali ini memuat artikel-artikel menarik seputar Pembayaran Tunjangan Hari Raya Tahun 2025 pada KPPN Pematang Siantar, Efisiensi Anggaran dan Strategi Mengatasinya, Kartini Masa Kini “Penggerak UMKM, Penopang Ekonomi”, Mengatasi Retur SP2D “Strategi Efektif untuk Kelancaran Pencairan Dana”, dan Keberlanjutan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) KPPN Pematang Siantar.

Kami berterima kasih kepada semua pihak yang mendukung penyusunan buletin Inang Cetar. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan buletin ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, kami menerima kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa mendatang.

Selamat membaca. Kami harapkan buletin ini dapat menjadi sumber informasi yang bermanfaat bagi stakeholders dan seluruh masyarakat untuk mendukung keuangan daerah Kota Pematangsiantar dan Kabupaten Simalungun dan keuangan nasional menuju Indonesia Maju.

# DAFTAR ISI

## DAFTAR ISI

01

REALISASI BELANJA APBN, PEMERINTAH PUSAT  
DAN TKD PERIODE TRIWULAN II

02

BUKAN SEKEDAR ANGKA, IKPA: CERMINAN  
KINERJA ANGGARAN SATKER YANG TAK  
BOLEH DIABAIKAN

06

11

REALISASI KPPN SALURKAN TUNJANGAN  
PROFESI LANGSUNG KE REKENING GURU:  
WUJUD NYATA KOMITMEN UNTUK  
PENDIDIKAN BERKUALITAS

14

DAMPAK PERUBAHAN PPR TERPUSAT PADA  
KPPN

18

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT  
TAHUN 2024: WAJAR TANPA PENGECUALIAN

21

MENJAGA INTEGRITAS, MELAYANI SEPENUH  
HATI: KOMITMEN BERKELANJUTAN KPPN  
PEMATANG SIANTAR

28

TUGU RAJA SANG NAUALUH DAMANIK, IKON  
BARU KOTA PEMATANGSIANTAR

# Realisasi APBN Periode Triwulan II 2025

Oleh Uli Natasya Girsang, PTPN Terampil

Pagu dan Realisasi APBN 2020-2025 (Triwulan II)

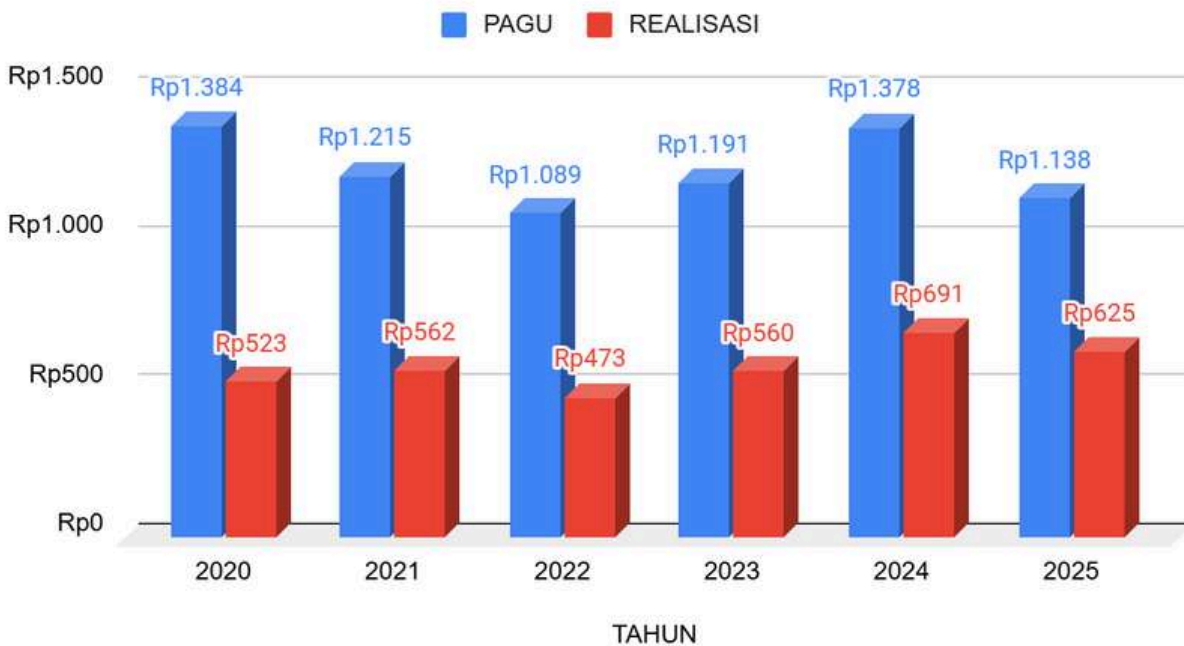


Berdasarkan diagram "Pagu dan Realisasi APBN 2020–2025 (Triwulan II)", terlihat bahwa terdapat perbedaan signifikan antara nilai pagu dan realisasi anggaran selama periode enam tahun tersebut. Pada tahun 2020 untuk periode Triwulan II, dari pagu sebesar Rp1.786 triliun, terealisasi Rp732 triliun, mencerminkan realisasi sekitar 41%. Kondisi serupa terjadi pada tahun 2021 dan 2022 dengan realisasi masing-masing sebesar Rp661 triliun dari pagu Rp1.682 triliun (sekitar 39%) dan Rp680 triliun dari pagu Rp1.837 triliun (sekitar 47%).

Memasuki tahun 2023 hingga 2025, jumlah pagu mengalami lonjakan signifikan, masing-masing menjadi Rp4.006 triliun, Rp4.630 triliun, dan Rp4.438 triliun. Peningkatan ini salah satunya disebabkan oleh adanya kebijakan pengalihan penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) yang semula dikelola langsung oleh Kementerian Keuangan pusat, kini dilakukan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Realisasi anggaran pada tahun 2023 mencapai Rp1.719 triliun (sekitar 43%), tahun 2024 sebesar Rp2.113 triliun (sekitar 46%), dan tahun 2025 sebesar Rp2.097 triliun (sekitar 47%) untuk periode Triwulan II. Meskipun peningkatan pagu belum sepenuhnya diiringi oleh realisasi yang setara, capaian realisasi dari tahun ke tahun menunjukkan tren yang stabil dan terus membaik. Hal ini mencerminkan upaya konsisten dalam peningkatan efektivitas penyerapan anggaran serta penguatan fungsi pengawasan dan pertanggungjawaban APBN.

## Realisasi Belanja Pemerintah Pusat (K/L) TW II 2020-2025

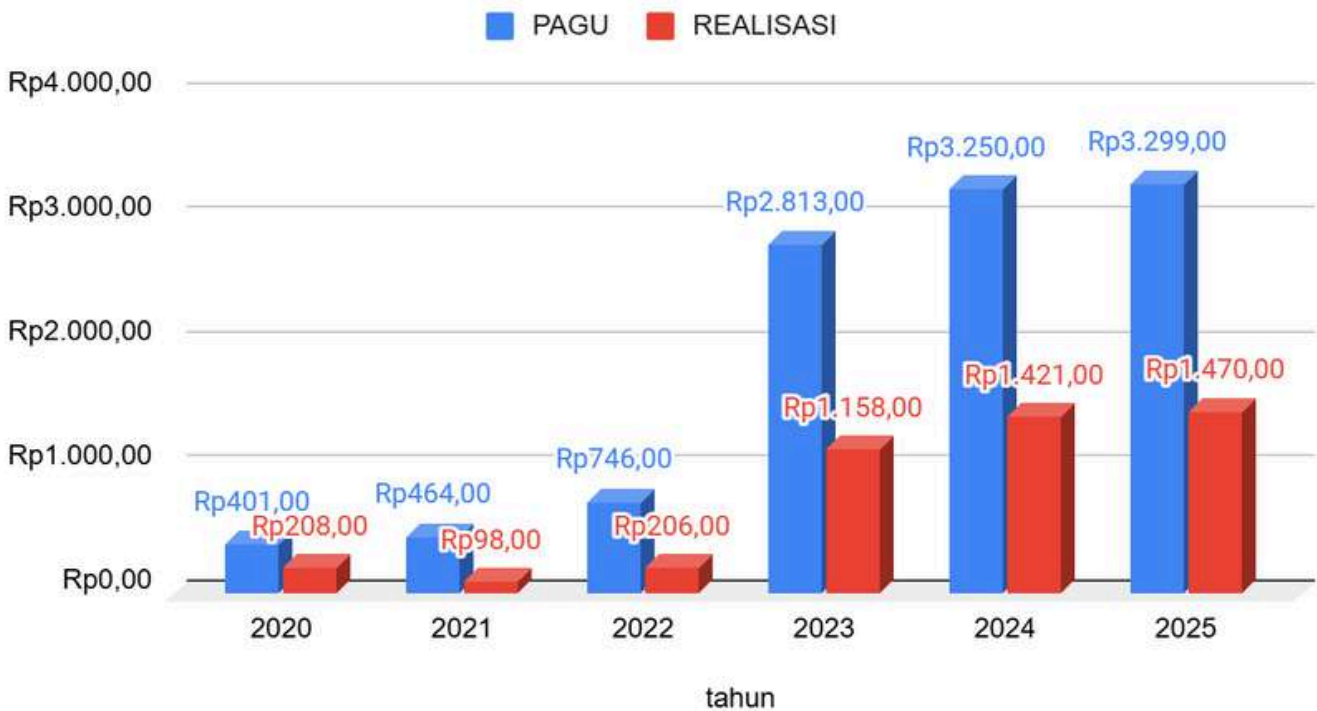
Pagu Realisasi Belanja K/L Triwulan II 2020-2025



Berdasarkan diagram “Pagu Realisasi Belanja K/L Triwulan II 2020–2025”, dapat dilihat bahwa alokasi anggaran belanja untuk Kementerian dan Lembaga (K/L) menunjukkan tren yang relatif stabil dan terjaga dari tahun ke tahun. Pagu belanja berada di kisaran Rp1.089 triliun hingga Rp1.384 triliun, mencerminkan komitmen pemerintah dalam mendukung pelaksanaan program-program prioritas nasional di berbagai sektor. Capaian realisasi belanja K/L juga menunjukkan konsistensi dan perbaikan yang menggembirakan. Misalnya, pada tahun 2024 dan 2025, realisasi mencapai Rp691 triliun dan Rp625 triliun, lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya seperti 2022 yang tercatat sebesar Rp473 triliun. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam efektivitas pelaksanaan anggaran, koordinasi antarinstansi, serta penguatan sistem perencanaan dan pelaporan. Secara keseluruhan, kinerja belanja K/L mencerminkan upaya yang serius dan berkelanjutan untuk memastikan anggaran negara digunakan secara tepat, efisien, dan berdampak langsung bagi masyarakat.

## Realisasi Belanja TKD TW II

Pagu dan Realisasi Belanja TKD Triwulan II 2020-2025



Berdasarkan diagram “Pagu dan Realisasi Belanja TKD Triwulan II 2020–2025”, terlihat adanya perkembangan yang sangat positif dalam alokasi dan realisasi Transfer ke Daerah (TKD). Pada tahun 2023 terjadi lonjakan signifikan dalam pagu TKD, dari Rp746 miliar pada 2022 menjadi Rp2.813 triliun, yang selanjutnya terus meningkat menjadi Rp3.250 triliun pada 2024 dan Rp3.299 triliun pada 2025. Peningkatan ini sejalan dengan kebijakan strategis pemerintah yang mengalihkan penyaluran TKD melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), guna mempercepat proses penyaluran dan meningkatkan efektivitas pengelolaan dana di daerah.

Realisasi belanja TKD pun menunjukkan kemajuan yang menggembirakan. Jika pada 2020–2022 realisasi masih di bawah Rp250 miliar, maka sejak 2023 terjadi lompatan besar dengan realisasi mencapai Rp1.158 triliun, dan terus meningkat menjadi Rp1.421 triliun pada 2024 serta Rp1.470 triliun pada 2025. Capaian ini mencerminkan semakin baiknya kapasitas daerah dalam menyerap anggaran serta meningkatnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Secara keseluruhan, tren ini menunjukkan keberhasilan kebijakan desentralisasi fiskal dan penguatan peran daerah dalam pembangunan nasional.

## Realisasi Transfer Ke Daerah Periode Triwulan II 2025

Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	%	Sisa Belum Terealisasi	%Sisa
DAK FISIK	Rp206.384.688.000	Rp3.044.182.875	1,48%	Rp203.340.505.125	98,52%
DAK NON FISIK	Rp507.355.380.000	Rp227.553.745.311	44,85%	Rp279.801.634.689	55,15%
DANA DESA	Rp332.760.518.000	Rp162.706.889.814	48,90%	Rp170.053.628.186	51,10%
Insentif Fiskal	Rp7.327.354.000	0	0,00%	Rp7.327.354.000	100,00%
DAU	Rp2.136.692.418.000	Rp1.040.892.908.000	48,72%	Rp1.095.799.510.000	51,28%
DBH	Rp108.836.482.000	Rp35.805.573.600	32,90%	Rp73.030.908.400	67,10%

Realisasi belanja Transfer ke Daerah (TKD) pada tahun 2025 untuk wilayah Kota Pematangsiantar dan Kabupaten Simalungun menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan, mencerminkan komitmen dan sinergi yang semakin baik antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan keuangan negara. Beberapa jenis belanja transfer telah mencapai realisasi yang cukup tinggi hingga pertengahan tahun. Dana Desa, misalnya, telah terealisasi sebesar Rp162,7 triliun atau 48,90% dari total pagu, sementara Dana Alokasi Umum (DAU) mencapai realisasi Rp1.040,8 triliun atau 48,72%. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik juga menunjukkan kinerja positif dengan realisasi sebesar Rp227,5 triliun atau 44,85%.

Meskipun masih terdapat ruang untuk percepatan, capaian ini menunjukkan bahwa proses penyaluran anggaran berjalan secara bertahap dan terstruktur, sejalan dengan kebutuhan dan kesiapan daerah. Realisasi yang mendekati 50% pada pertengahan tahun mencerminkan potensi tinggi untuk pencapaian target tahunan secara penuh di akhir tahun anggaran. Hal ini menjadi sinyal positif terhadap efektivitas kebijakan fiskal transfer ke daerah, sekaligus mencerminkan perbaikan dalam sistem pelaporan, koordinasi, serta penggunaan dana oleh pemerintah daerah untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik.

# ***Bukan Sekedar Angka, IKPA: Cerminan Kinerja Anggaran Satker yang Tak Boleh Diabaikan***

*Opini oleh Trisfila Delvia, PTPN Mahir*

Dalam sistem pengelolaan keuangan negara, satuan kerja (satker) berperan sebagai ujung tombak dalam merealisasikan belanja pemerintah. Seiring dengan meningkatnya alokasi anggaran belanja dari tahun ke tahun, perhatian terhadap kualitas pelaksanaan anggaran menjadi semakin penting dan tidak dapat diabaikan. Tidak cukup hanya mengukur seberapa besar anggaran yang terserap, pelaksanaan anggaran kini dituntut untuk lebih efektif, efisien, dan akuntabel. Menjawab tantangan tersebut, Kementerian Keuangan selaku Bendaha Umum Negara menghadirkan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sebagai alat ukur yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan kualitas tata kelola anggaran secara menyeluruh di tingkat satker. IKPA dirancang untuk mengevaluasi aspek perencanaan, pelaksanaan, hingga hasil penggunaan anggaran, sehingga mampu memberikan gambaran komprehensif terhadap kinerja satuan kerja dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional.

IKPA telah dikenalkan sejak tahun 2014 untuk pengukuran dan apresiasi kinerja Pelaksanaan Anggaran K/L (Dilansir dari situs resmi KPPN Tarakan: Meninjau Lebih Lanjut Mengenai Indikator Kualitas Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L, Maret 2021). Pada masa itu, pengolahan data IKPA dilakukan secara manual melalui proses cleansing data sehingga masih terdapat risiko kehilangan set data. Penilaian kinerja pelaksanaan anggaran terus bertransformasi, sejak tahun 2018 data IKPA telah diolah dan ditampilkan secara otomatis oleh system dalam Aplikasi Online Monitoring SPAN (OMSPAN) yang tentunya menawarkan banyak manfaat dalam pelaksanaan anggaran.

Penulis beropini bahwa sebelum IKPA diterapkan maka penilaian kinerja pelaksanaan anggaran satker masih minim makna. Sebelum masa itu, fokus penilaian kinerja dominan pada tingkat penyerapan anggaran satker, tanpa mempertimbangkan sisi perencanaan dan kualitas keluaran (output) yang dihasilkan atau dengan kata lain evaluasi kinerja satker sebelum IKPA diterapkan masih berupa administratif dan kuantitatif. Hal tersebut mungkin menjadi salah satu penyebab realisasi anggaran belanja yang cenderung menumpuk pada akhir tahun anggaran. Selain itu juga, beberapa KPPN selaku financial advisor satker mungkin sudah menerapkan kebijakan untuk melakukan evaluasi kinerja anggaran satker mitra kerjanya sebelum IKPA diterapkan secara nasional. Namun atas kebijakan tersebut sangat dimungkinkan adanya perbedaan standar penilaian antara satu KPPN dengan yang lainnya. Ketidakterpaduan ini menyulitkan proses perbandingan dan pembelajaran antar satker, serta menghambat upaya perbaikan yang bersifat sistemik. Tidak hanya itu, sebelum IKPA diterapkan maka proses monitoring dan evaluasi anggaran juga masih

dilakukan secara manual dan tidak dapat diakses sewaktu-waktu (real-time). Satker harus menunggu laporan berkala dari KPPN untuk mengetahui posisi kinerja pelaksanaan anggarannya. Namun sering sekali informasi yang didapatkan terlambat diketahui satker karena hasil atas evaluasi kinerja satker diterima setelah periode penilaian berakhir. Hal ini berarti bahwa terdapat berbagai kendala dalam pelaksanaan anggaran yang tidak dapat diidentifikasi serta diselesaikan secara dini sebelum penerapan IKPA.

Dalam rangka memperkuat tata kelola pelaksanaan anggaran belanja negara, IKPA telah mengalami reformulasi. Pada saat ini IKPA telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Belanja Kementerian Negara/Lembaga. IKPA merupakan instrumen evaluasi yang dirancang untuk mengukur kualitas pelaksanaan anggaran oleh satuan kerja secara objektif, terukur, dan berkelanjutan. Dalam aturan ini telah ditetapkan bahwa penilaian dilakukan melalui tiga aspek, yaitu kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Oleh karena itu, memahami dan memperhatikan IKPA bukanlah sebuah pilihan, melainkan keharusan bagi setiap satker untuk menunjukkan kinerja yang profesional, transparan, dan bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan negara.

IKPA memiliki tiga aspek penilaian kinerja pelaksanaan anggaran yang tentunya saling berkaitan. Ketiga aspek tersebut dijabarkan ke dalam delapan indikator kinerja. Pertama, aspek Kualitas Perencanaan Anggaran memiliki bobot penilaian sebesar 25 persen dan terdiri dari dua indikator, yaitu Revisi DIPA dan Deviasi Halaman III DIPA. Kedua, Aspek Kualitas Implementasi Pelaksanaan Anggaran memiliki bobot 50 persen dan mencakup empat indikator utama, yaitu Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, dan Pengelolaan UP/TUP. Terakhir, aspek Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran memiliki bobot 25 persen dan diukur melalui satu indikator utama, yaitu Capaian Output, yang menilai efektivitas belanja negara berdasarkan hasil nyata yang dicapai oleh satker.

Sebagai bentuk pengukuran yang objektif dan terstandar, hasil penilaian IKPA diklasifikasikan ke dalam empat kategori nilai yang mencerminkan tingkat kualitas pelaksanaan anggaran oleh satuan kerja. Kategori tersebut terdiri dari: Sangat Baik (nilai  $\geq 90$ ), Baik (80–89,99), Cukup (65–79,99), dan Kurang (nilai  $< 65$ ). Klasifikasi ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai kinerja pelaksanaan anggaran, sekaligus menjadi dasar bagi KPPN selaku financial advisor dalam memberikan apresiasi dan juga pembinaan serta evaluasi atas kinerja pelaksanaan anggaran satker. Satker yang berada pada kategori "Sangat Baik" menunjukkan tingkat kepatuhan dan efektivitas yang tinggi dalam pengelolaan anggaran, sementara kategori "Kurang" menjadi sinyal perlunya perbaikan dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, maupun pencapaian hasil anggaran.

Mari lihat lebih dekat tujuan dari masing-masing aspek penilaian dan indikator pada IKPA. Aspek Kualitas Perencanaan Anggaran dalam IKPA bertujuan untuk menilai kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan yang direncanakan dan ditetapkan dalam DIPA. Penilaian ini mencakup dua indikator utama, yaitu Revisi DIPA dan Deviasi Halaman III DIPA. Indikator Revisi DIPA bertujuan untuk mengukur kualitas perencanaan anggaran satker berdasarkan frekuensi revisi DIPA yang dilakukan oleh Satker dalam satu semester. Hal ini berarti bahwa apabila satker telah berhasil merencanakan kebutuhan dengan akurat maka seharusnya frekuensi Revisi DIPA semakin minim, begitu juga sebaliknya. Dalam perjalanannya, sering kali pelaksanaan anggaran tidak dapat berjalan sesuai dengan perencanaan karena adanya berbagai kebijakan dan factor eksternal diluar kendali satker. Untuk itu, satker masih diberikan nilai 100 (seratus) apabila pengajuan Revisi DIPA dalam rangka pagu tetap dilakukan maksimal sebanyak 2 (dua) kali dalam satu semester. Pada aspek ini juga terdapat indikator Deviasi Halaman III DIPA yang digunakan untuk mengukur kualitas perencanaan anggaran satker berdasarkan rata-rata nilai kinerja bulanan deviasi halaman III DIPA. Deviasi Halaman III DIPA dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang kesesuaian antara realisasi anggaran terhadap RPD bulanan pada setiap jenis belanja dengan memperhitungkan proporsi pagu masing-masing jenis belanja. RPD Halaman III DIPA tentunya dapat disusun oleh satker setiap awal triwulan dengan harapan satker dapat menyusun RPD Halaman III DIPA dengan lebih akurat. Hal ini menjadi penting karena semakin akurat satker dalam menyusun RPD Halaman III DIPA maka hal tersebut dapat menjadi acuan bagi Pemerintah dalam mengelola arus kas serta memastikan ketersediaan dana untuk pembayaran kegiatan yang akan dilakukan oleh satker. Selain itu, semakin akurat RPD Halaman III DIPA satker maka proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran menjadi lebih efektif sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang tepat berdasarkan data yang valid.

Aspek Kualitas Implementasi Pelaksanaan Anggaran bertujuan untuk menilai kemampuan Satker dalam merealisasikan anggaran yang telah ditetapkan pada DIPA. Penilaian terhadap aspek ini mencakup empat indikator utama dengan penjelasan sebagai berikut. Indikator Penyerapan Anggaran bertujuan untuk menghitung rata-rata nilai kinerja penyerapan anggaran terhadap target penyerapan anggaran masing-masing jenis belanja setiap triwulan. Hal ini dimaksudkan agar penyerapan anggaran tidak lagi menumpuk pada akhir tahun anggaran dan agar satker dapat merealisasikan anggaran belanjanya lebih awal sehingga dapat memberikan multiplier effect terhadap perekonomian karena dana yang tersalurkan akan mendorong perputaran ekonomi melalui peningkatan konsumsi, investasi, dan aktivitas produksi di berbagai sektor. Berikutnya adalah Indikator Belanja Kontraktual yang digunakan untuk mengukur upaya akselerasi belanja kontraktual pada satker seperti akselerasi kontrak dini (kontrak yang proses pengadaan dan perikatannya telah selesai sampai dengan triwulan I), akselerasi belanja modal (penyelesaian pembayaran atas perjanjian/kontrak Belanja Modal yang dibayarkan sekaligus dengan nilai Rp50 juta ke atassampai dengan Rp200 juta),

dan distribusi akselerasi belanja modal (menghitung penyelesaian rasio jumlah data perjanjian/kontrak yang proses pengadaan dan perikatannya telah selesai sampai dengan triwulan II dan didaftarkan ke KPPN dibandingkan dengan total seluruh kontrak yang terdaftar). Hal ini menunjukkan kesiapan satker dalam melaksanakan kegiatan secara tepat waktu dan sesuai dengan perencanaan. Indikator Penyelesaian Tagihan bertujuan untuk mengukur ketepatan waktu penyampaian SPM LS Kontraktual satker. Ketepatan waktu dalam pengajuan tagihan mencerminkan kedisiplinan dan tanggung jawab satuan kerja dalam menjalankan proses administrasi keuangan serta memberikan kepastian pembayaran kepada rekanan atau penyedia barang/jasa, sehingga menjaga kepercayaan dan kelancaran hubungan kerja sama antara satker dan mitra kerja. Terakhir adalah Indikator Pengelolaan UP/TUP yang bertujuan untuk mengukur ketepatan waktu pertanggungjawaban UP (GUP) dan pertanggungjawaban TUP (PTUP), efisiensi besaran UP dan TUP yang dikelola, dan penggunaan UP Kartu Kredit Pemerintah (KKP). Pertanggungjawaban yang dilakukan tepat waktu menunjukkan kedisiplinan satuan kerja serta mencegah terjadinya penumpukan dana yang tidak termanfaatkan secara optimal (*idle cash*). Dana TUP yang telah dimohonkan seharusnya digunakan sesuai dengan rincian kebutuhan yang diajukan. Apabila dalam pelaksanaannya terdapat setoran sisa TUP, hal tersebut mengindikasikan bahwa satuan kerja tidak merencanakan kebutuhannya secara akurat.

Aspek Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran merupakan bagian penting dalam penilaian IKPA yang berfokus pada hasil nyata dari pelaksanaan anggaran oleh satuan kerja (satker). Penilaian terhadap aspek ini dilakukan melalui indikator Capaian Output, yang mengukur ketepatan waktu penyampaian data dan ketercapaian output pada satker. Indikator ini tidak hanya menilai apakah anggaran telah digunakan, tetapi juga apakah penggunaan tersebut menghasilkan manfaat sesuai dengan tujuan program. Capaian output yang rendah dapat menunjukkan bahwa belanja belum memberikan nilai yang optimal, sehingga perlu dilakukan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan kegiatan. Dengan demikian, aspek ini mendorong satker untuk tidak hanya fokus pada penyerapan anggaran, tetapi juga pada kualitas dan dampak dari hasil yang dicapai.

IKPA bukanlah sekadar angka yang muncul di akhir penilaian kinerja pelaksanaan anggaran satker. Di balik setiap nilai IKPA, terdapat proses panjang yang mencerminkan bagaimana satuan kerja merencanakan, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran negara. Satker yang memperoleh nilai IKPA tinggi menunjukkan bahwa mereka telah menjalankan proses perencanaan yang matang, pelaksanaan yang disiplin, serta pengelolaan keuangan yang akuntabel. Sebaliknya, nilai IKPA yang rendah menjadi sinyal bahwa terdapat kelemahan dalam proses pengelolaan anggaran yang perlu segera diperbaiki. Dengan demikian, IKPA berfungsi sebagai alat kontrol sekaligus pendorong perbaikan berkelanjutan. Melalui indikator yang terukur, IKPA mendorong satker untuk lebih transparan dalam pelaporan dan lebih akuntabel dalam pelaksanaan. Dalam konteks

reformasi birokrasi dan penguatan akuntabilitas publik, IKPA berperan sebagai alat ukur kinerja yang strategis. Nilai IKPA dapat digunakan oleh pimpinan instansi untuk menilai efektivitas pelaksanaan program. Bagi KPPN, nilai IKPA digunakan sebagai alat untuk memberikan apresiasi dan pembinaan, dan oleh pemerintah pusat nilai IKPA dapat digunakan untuk menyusun kebijakan fiskal yang lebih tepat sasaran. Oleh karena itu, IKPA bukan hanya angka administratif, melainkan refleksi dari komitmen satker dalam menjalankan amanah pengelolaan keuangan negara secara profesional dan bertanggung jawab.



## ***KPPN SALURKAN TUNJANGAN PROFESI LANGSUNG KE REKENING GURU: WUJUD NYATA KOMITMEN UNTUK PENDIDIKAN BERKUALITAS***

*Oleh Tommy Hansen Panjaitan, Kepala Seksi Bank*

"Sesungguhnya dalam pembangunan suatu bangsa, nation building, satu-satunya jalan menuju keberhasilan suatu negara, keberhasilan suatu bangsa, pada dasarnya adalah pendidikan. Pendidikan akan menentukan apakah bangsa itu bisa jadi sejahtera, bisa jadi makmur," adalah ucapan Presiden Prabowo saat peluncuran mekanisme baru penyaluran tunjangan guru Aparatur Sipil Negara (ASN) daerah langsung ke rekening guru pada Kamis, 13 Maret 2025.

Tunjangan Profesi Guru (TPG) merupakan bentuk apresiasi dan pengakuan terhadap profesionalisme guru yang telah memiliki sertifikat pendidik, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang tunjangan profesi dan tunjangan kehormatan bagi guru dan dosen. Selama ini, pembayaran TPG dilakukan melalui mekanisme TKD, yaitu DAK Non Fisik, yang disalurkan ke rekening kas pemerintah daerah untuk selanjutnya dibayarkan kepada guru ASN daerah yang memenuhi syarat.

Namun dalam pelaksanaannya, mekanisme tersebut tidak lepas dari sejumlah kendala yang dirasakan oleh para guru, antara lain ketidakpastian waktu dan jumlah pencairan.

"Sejak tahun 2010-2024, sekitar 15 tahun berlalu, tunjangan guru ditransfer Kementerian Keuangan kepada Rekening Pemerintah Daerah, yaitu Rekening Kas Umum Daerah, untuk selanjutnya ditransfer ke rekening guru. Proses transfer itu sebagian besarnya dilakukan 3 bulan sekali. Proses transfer memakan waktu yang lama, guru menerimanya per 3 bulan, bahkan di beberapa daerah ada yang mengalami keterlambatan dengan berbagai alasan," ungkap Abdul Mu'ti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, dilansir dari website sekretariat negara.

Sebanyak 1.476.964 guru ASN akan menerima tunjangan langsung ke rekening, sementara 392.802 guru non-ASN juga akan menerima transfer langsung dari Kemendikdasmen. Proses verifikasi dan validasi data terus dilakukan agar pencairan dana berjalan lancar dan tepat sasaran.

Untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyaluran, pemerintah melakukan perubahan sistem pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) dengan menyalurkannya langsung dari pemerintah pusat langsung ke rekening masing-masing guru. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4 Tahun 2025. Pemberian tunjangan profesi guru dilaksanakan dengan prinsip tertib, efisien, efektif, transparan dan akuntabel. Dengan skema baru ini, penyaluran dana tidak lagi melalui pemerintah daerah, melainkan dilakukan secara langsung oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

KPPN Pematang Siantar sendiri telah menyalurkan Tunjangan Profesi Guru pada Kabupaten Simalungun dan Kota Pematangsiantar sejak Maret 2025 dengan nilai penyaluran sebagai berikut:

Kabupaten Simalungun

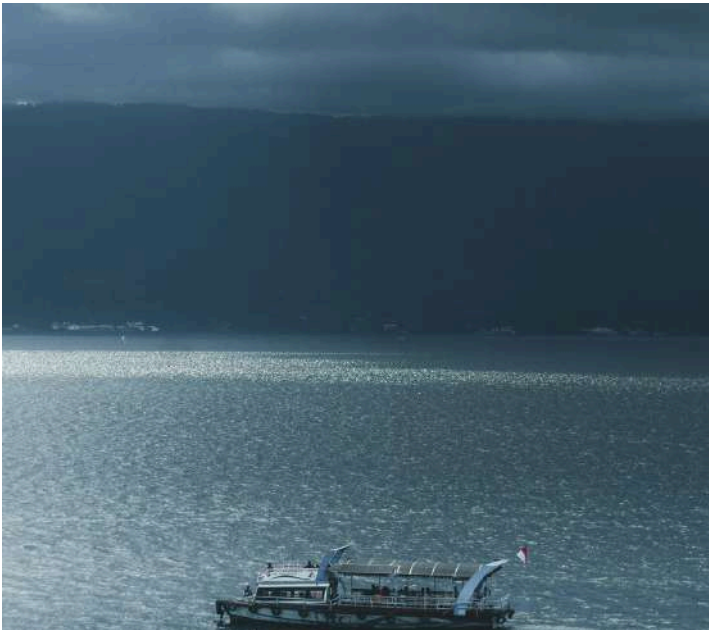
Bulan	Nilai Penyaluran	Jumlah Penerima
Maret	Rp4.396.017.500	349
April	Rp14.606.362.500	1156
Mei	Rp21.841.449.600	1964
Juni	Rp56.547.597.200	4896

## Kota Pematangsiantar

Bulan	Nilai Penyaluran	Jumlah Penerima
Maret	Rp4.465.662.500	357
April	Rp5.639.985.300	440
Mei	Rp2.816.758.200	264
Juni	Rp13.842.831.800	1158

Sebagai unit kerja di bawah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan, KPPN kini mengemban tugas untuk menyalurkan TPG secara tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran.

Melalui mekanisme penyaluran Tunjangan Profesi Guru (TPG) secara langsung ke rekening masing-masing guru, diharapkan kesejahteraan guru dapat meningkat, sehingga berdampak positif terhadap peningkatan kualitas pendidikan bagi generasi penerus bangsa.



## ***DAMPAK PERUBAHAN PPR TERPUSAT PADA KPPN***

*Oleh Zulfan, Kepala Seksi Pencairan Dana*

Pelaksanaan PPR (Payment Process Request) Terpusat merupakan salah satu milestone strategis dalam roadmap penataan dan transformasi organisasi DJPb dalam rangka penguatan proses bisnis dan tugas dan fungsi KPPN sebagai respon dalam melakukan simplifikasi pembayaran.

Proses bisnis yang sesuai dengan SPAN ver.2.0 telah ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-116/PB/PB.1/2024 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-244/PB/PB.1/2023 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. Adapun perubahan tersebut meliputi: Perubahan 15 SOP Seksi PD/PDMS, Penghapusan 11 SOP Seksi Bank dan Penambahan 2 SOP Seksi Vera/Veraki (Penambahan 3 SOP). Potensi Perubahan ABK pada KPPN (Seksi Bank dan Vera/Veraki).

Di samping itu terdapat potensi perubahan dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 1 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-24/PB/2019 tentang Pedoman Pembinaan dan Supervisi Pelaksanaan Tugas KPPN.

Berikut ini akan disampaikan dan dijelaskan secara singkat beberapa dampak yang terjadi sebagai akibat dari Implementasi PPR Terpusat tersebut yaitu:

1. Adanya perubahan SOP pada KPPN sesuai dengan Keputusan Dirjen Perbendaharaan Nomor KEP-116/PB/PB.1/2024 dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 1 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-24/PB/2019 yang telah disebutkan di atas.

2. Adanya perubahan dalam Analisis Beban Kerja dan Perencanaan Kebutuhan SDM, serta membuka ruang untuk arah Penataan Organisasi yang berperan lebih strategis ke depan yang meliputi 2 tahap yaitu: tahap 1: adanya efisiensi dari tidak dibutuhkannya lagi proses unduh/unggah ADK dan tugas *reviewer* pada Seksi PD. Kemudian fungsi koreksi dan konfirmasi penerimaan negara yang sepenuhnya dilakukan sistem pada Seksi Bank. Selanjutnya dalam tahap 2 yaitu adanya efisiensi tambahan dari Pemusatan Proses PPR pada Seksi Bank, Retur dan Persetujuan TUP pada Seksi MSKI serta untuk proses rekonsiliasi akan dilakukan sepenuhnya oleh sistem pada Seksi Vera. Sehingga terdapat potensi Penurunan Beban Kerja dalam pemrosesan SPM dan administrasi penerimaan negara yang berkurang pada seksi PD dan Bank di mana Potensi Perubahan Beban Kerja tersebut adalah sebesar 100% karena pelaksanaan PPR dan Retur tidak lagi dilakukan Kantor Vertikal melainkan dialihkan ke Direktorat PKN. Jadi, perubahan pada beban kerja ini membuka ruang atau peluang untuk memperkuat fungsi analitik dan *financial advisory* di KPPN.

3. Terjadi penguatan dan penajaman fungsi KPPN sebagai *regional economist* dan *financial advisor* pada masing-masing seksi teknis. Untuk seksi Pencairan Dana terdapat: shadowing tusi terkait manajemen satker dalam mendukung tata kelola CSO dan pengendalian pelaksanaan anggaran satuan kerja, termasuk dalam penyaluran TKD, bersama dengan Seksi Bank dan Seksi Vera. Kemudian untuk seksi Bank adanya penguatan peran *financial advisor local government* dan *special mission*, penguatan penyaluran TKD (penyampaian kinerja pelaksanaan TKD kepada pemda, proyeksi TKD dan potensi penambahan jenis penyaluran TKD berbasis kinerja) serta shadowing tusi terkait manajemen satker dalam mendukung CSO.

Untuk Seksi Verifikasi dan Akuntansi yaitu: penyelesaian retur SP2D, perekaman LK Korporasi Publik, penajaman pelaksanaan Monev TKD bersama dengan Seksi Bank serta shadowing tuisi terkait manajemen satker dalam mendukung tata kelola CSO.

Sedangkan untuk seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal meliputi: pembinaan Jafung Keuangan Negara, supervisi teknis SPAN dan SAKTI, dan penguatan pelaksanaan tata kelola CSO sebagai *Quality Assurance Officer* dan *Subject Matter Expert* (Manajemen Satker), penguatan pengendalian intern atas perubahan SOP KPPN, pemetaan potensi pengaduan stakeholders atas perubahan proses bisnis, dan shadowing tuisi terkait manajemen satker dalam mendukung tata kelola CSO (Kepatuhan Internal).

Untuk mencapai penguatan dan penajaman fungsi KPPN tersebut, maka diperlukan Strategi Kebijakan, Upskilling Kompetensi, dan Tools Kebijakan. Strategi Kebijakan yang meliputi: optimalisasi tata kerja CSO melalui kontribusi aktif seluruh elemen unit, penguatan budaya kolaboratif berbasis mekanisme kerja adaptif, evaluasi dan pemerataan beban kerja, serta dengan adanya Forum koordinasi Kantor Pusat dan KPPN sebagai wadah koordinasi kebijakan.

Kemudian untuk Upskilling Kompetensi dilakukan melalui Kompetensi Utama yang terdiri dari: data analytics, pengelolaan keuangan daerah, transfer ke daerah, dan HKPD, serta dengan adanya Kompetisi Pendukung yang meliputi: public speaking, negoisasi dan persuasi, serta advisory

Selanjutnya disiapkan beberapa Tools Kebijakan yang terdiri dari: kebijakan penajaman CSO, mekanisme kerja, adanya jabatan fungsional konsolidasi, dan delayering.

4. Dampak yang terakhir adalah terdapat perubahan dalam Manajemen Kinerja di mana Pengukuran Kinerja akan menyesuaikan Proses Bisnis SPAN 2.0, pada beberapa IKU, yaitu: persentase akurasi perencanaan kas, indeks kualitas penyelesaian SP2D, dan indeks akurasi verifikasi PPR.

IKU persentase akurasi perencanaan kas merupakan IKU cascading mulai dari Kepala Kanwil, Kepala Bidang PPA I, Kepala Seksi PPA I (pada Kanwil), kemudian Kepala KPPN, dan Kepala Seksi PD/PDMS/MSKI/Bank (pada KPPN). Adapun rekomendasi untuk IKU ini adalah akan dihapus. Kemudian untuk IKU indeks kualitas penyelesaian SP2D yang merupakan IKU cascading dari Kepala KPPN kepada Kepala Seksi PD/PDMS/Bank, dimana komponen dalam penyelesaian SP2D 1 jam dan jumlah penerima dalam SP2D akan disesuaikan. Sedangkan untuk IKU Indeks akurasi verifikasi Payment Process Request (PPR) pada pelaksana Seksi Bank akan direkomendasikan untuk dihapus.

Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa kebijakan implementasi PPR Terpusat ini adalah merupakan salah satu langkah yang diambil dalam rangka memperkuat dan mempertajam fungsi dan peran baru DJPb sebagai *Regional Economist* dan *Financial Advisor* khususnya pada KPPN.

# LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2024: WAJAR TANPA PENGECUALIAN

Oleh Surya Hadi Purnama, Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi



Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, Isma Yaton, menyampaikan bahwa BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2024. Hal itu disampaikannya pada acara penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LKPP Tahun 2024 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2024 kepada Pimpinan DPR di Jakarta pada tanggal 27 Mei 2025. Opini WTP ini merupakan yang ke-9 secara beruntun sejak tahun 2016 yang diraih Pemerintah atas LKPP. BPK menilai pertanggungjawaban pelaksanaan APBN Tahun 2024 sebagaimana disampaikan dalam LKPP Tahun 2024 secara material telah disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah, diungkapkan secara memadai, dan didasarkan sistem pengendalian intern yang efektif. Tentu saja hal ini menggembirakan kita semua karena LKPP sejatinya merupakan buah kerja keras kita semua dari mulai tingkat satuan kerja yang mencatat dan melaporkan transaksi keuangan dan aset secara memadai dan sesuai standar yang ditetapkan.

Namun demikian, LKPP Tahun 2024 masih menyisakan beberapa persoalan. Dari seluruh Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL) yang dikonsolidasikan menjadi LKPP masih terdapat 2 LKKL yang tidak mendapatkan opini WTP. Meskipun tidak berdampak material terhadap kewajaran LKPP Tahun 2024 secara keseluruhan, Badan Pangan Nasional dan Badan Karantina Indonesia, memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Selain itu, masih terdapat temuan dan rekomendasi temuan yang perlu segera ditindaklanjuti. Terdapat 14 temuan dan 31 rekomendasi dari BPK yang harus ditindaklanjuti Pemerintah.



Temuan dan rekomendasi yang diberikan BPK itu setidaknya dapat dikelompokkan ke dalam 6 (enam) klaster temuan. Pertama, Penyusunan LKPP Tahun 2024 belum Didukung Sumber Daya, Metodologi Penyusunan, serta Pengaturan atas Periode Waktu dan Pedoman Penyusunan yang Memadai. Atas temuan ini, BPK merekomendasikan agar Kementerian Keuangan senantiasa mendorong agar seluruh K/L dapat menyampaikan LKJKL yang telah melalui reviu APIP.

Kedua, Pengendalian atas Sisa Dana Hibah untuk Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 Belum Sepenuhnya Memadai. Atas temuan ini, BPK merekomendasikan agar mekanisme pengembalian sisa dana dari hibah dalam bentuk uang yang penarikannya tidak melalui Kuasa BUN, yaitu KPU dan Bawaslu harus mengajukan proses pengesahan setelah kegiatan selesai dilaksanakan.

Ketiga, Kebijakan Revisi Anggaran Setelah Tahun Anggaran Berkenaan Berpotensi Menimbulkan Ketidaktertiban Penyelesaian Revisi Anggaran pada Tahun Berkenaan. Atas temuan ini, BPK merekomendasikan agar Pengguna Anggaran (PA) melakukan pengendalian dan pemantauan penyelesaian revisi anggaran sesuai batas waktu di tahun berkenaan. Keempat, Pengendalian atas Penganggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Belum Sepenuhnya Memadai. Atas temuan ini, BPK merekomendasikan agar PA untuk lebih cermat melakukan perhitungan kebutuhan Belanja Pegawai berdasarkan data yang lengkap dan valid serta didukung sistem informasi yang memadai guna memitigasi adanya risiko pagu minus.

Kelima, Penyajian Belanja Dibayar Dimuka (BDDM) Belum Sepenuhnya Sesuai Karakteristik Aset Lancar dan Penyelesaian Pertanggungjawaban atas Belanja Dibayar Dimuka serta Penyerahan Persediaan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda Berlarut-larut. Atas temuan ini, BPK merekomendasikan untuk dilakukan inventarisasi dan segera menyelesaikan BDDM yang merupakan pengeluaran belanja yang belum selesai pertanggungjawabannya.



Keenam, Aset Tetap Tanah Belum Sepenuhnya Didukung Dokumen Kepemilikan Berupa Sertifikat Tanah Sesuai Ketentuan. Atas temuan ini, BPK merekomendasikan agar Pengelola dan Pengguna Barang agar Meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas BMN melalui pengamanan fisik secara memadai, terutama terhadap aset tetap tanah yang belum memiliki dokumen kepemilikan berupa sertifikat atas nama Pemerintah c.q K/L dan/atau atas nama K/L; dan melakukan percepatan penyelesaian pensertifikatan aset tetap tanah yang belum berstatus clean and clear sesuai dengan ketentuan.

Disamping itu, pada LKPP Tahun 2024, BPK menekankan bahwa salah satu area yang menjadi perhatian utama adalah pelaporan kinerja yang terintegrasi ke dalam Catatan atas LKPP (CaLK) Tahun 2024 yang masih memerlukan penguatan dari segi sumber daya, metodologi, dan pedoman penyusunan. Integrasi antara laporan keuangan dan laporan kinerja merupakan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 sebagaimana tertuang dalam penjelasan pasal 9 huruf g yang menjelaskan bahwa penyusunan dan penyajian laporan keuangan dimaksud adalah dalam rangka akuntabilitas dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara, termasuk prestasi kerja yang dicapai atas penggunaan anggaran.

Predikat WTP merupakan opini tertinggi yang diberikan atas LKPP. Namun demikian, kita tidak boleh berpuas diri atas capaian tertinggi yang kita peroleh tersebut. Masih banyak hal-hal yang perlu perhatian kita untuk diperbaiki agar kualitas laporan keuangan yang kita susun dan hasilkan menjadi lebih baik. Perbaikan terus menerus (continuous improvement) menjadi semangat kita agar LKPP menjadi instrumen untuk mewujudkan akuntabilitas, transparansi, dan informasi yang dapat diandalkan dalam pengambilan keputusan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat.

# ***MENJAGA INTEGRITAS, MELAYANI SEPENUH HATI: KOMITMEN BERKELANJUTAN KPPN PEMATANG SIANTAR***

*Oleh Yusuf Prihantoro, Kepala Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal*

Pembangunan Zona Integritas merupakan langkah strategis dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi. Inisiatif ini diusung oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) melalui pengembangan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Pembangunan Zona Integritas bukan sekadar program, tetapi sebuah perjalanan berkelanjutan menuju transformasi pelayanan publik yang berorientasi pada integritas dan profesionalisme.

Sebagai instansi yang telah meraih predikat WBK, KPPN Pematang Siantar terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat budaya kerja yang antikorupsi. Puncaknya, pada tahun 2024, KPPN Pematang Siantar berhasil menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih predikat WBBM dari Kementerian PAN-RB. Prestasi ini menjadi tonggak penting, namun bukan akhir dari perjalanan. Justru menjadi pemicu semangat untuk terus menjaga dan mengembangkan kualitas layanan serta menanamkan nilai-nilai integritas di setiap lini pelayanan.

KPPN Pematang Siantar secara aktif menggelar berbagai kegiatan untuk memastikan keberlanjutan Zona Integritas, mulai dari sosialisasi, *press release*, bimbingan teknis, hingga program unggulan seperti *Island of Integrity*. Melalui berbagai upaya ini, nilai-nilai antikorupsi terus disuarakan dan ditanamkan, tidak hanya di lingkungan internal, tetapi juga kepada seluruh pemangku kepentingan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh KPPN Pematang Siantar pada Triwulan II tahun 2025 antara lain:





### 1. Sortali (Sharing our reaction and talking about integrity)

Menumbuhkan budaya integritas di lingkungan kerja bukan hanya soal aturan, tetapi juga soal pembiasaan, refleksi, dan keteladanan. KPPN Pematang Siantar menghadirkan Sortali (Sharing Our Reaction and Talking About Integrity) sebagai salah satu inovasi edukatif yang dirancang untuk memperkuat nilai-nilai integritas melalui pendekatan yang lebih interaktif dan inspiratif.

Sortali bukan sekadar diskusi biasa. Kegiatan ini menjadi wadah berbagi pandangan tentang integritas melalui berbagai media—mulai dari kisah tokoh nasional dan internasional, pemutaran film inspiratif, hingga pemaparan materi yang relevan dengan nilai-nilai antikorupsi dan etika kerja.

Pada Triwulan II tahun 2025, sesi Sortali menghadirkan langsung Kepala KPPN Pematang Siantar, Ibu Nova Juliana Sianturi, sebagai narasumber utama. Dalam kesempatan tersebut, beliau membawakan topik yang sangat relevan: Penguatan Budaya Integritas di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Sesi ini menjadi momen penting untuk memperkuat komitmen bersama. Ibu Nova menyoroti beberapa aspek strategis dalam membangun budaya integritas di lingkungan KPPN, antara lain pengendalian gratifikasi, penerapan Kerangka Kerja Integritas, serta hasil revidi Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024. Hasil survei ini digunakan sebagai bahan refleksi bersama serta lesson learned untuk meningkatkan akuntabilitas dan profesionalisme di unit kerja.

Dengan adanya Sortali, KPPN Pematang Siantar tidak hanya menunjukkan konsistensinya dalam menjaga integritas, tetapi juga mengajak seluruh pegawai untuk aktif berpikir kritis dan berkontribusi dalam membangun lingkungan kerja yang bersih, melayani, dan penuh tanggung jawab.

## 2. Island of Integrity

Sebagai bagian dari komitmen dalam menyebarkan semangat pembangunan Zona Integritas, KPPN Pematang Siantar terus menjalin kolaborasi strategis dengan para pemangku kepentingan. Salah satu langkah nyata ini diwujudkan melalui kegiatan konsultasi bersama Aparat Penegak Hukum (APH) yang dilaksanakan pada Triwulan II tahun 2025.

Dalam forum yang penuh semangat dan terbuka ini, KPPN Pematang Siantar mengangkat tema seputar hukum keuangan negara serta upaya penegakan tindak pidana yang berkaitan dengan pelaksanaan anggaran satuan kerja (satker) dan penyaluran dana Transfer ke Daerah. Kegiatan ini dihadiri oleh Kapolres Simalungun, AKBP Marganda Aritonang, SH., SIK., MM, serta Kepala KPPN Pematang Siantar, Ibu Nova Juliana Sianturi.

Dalam sambutannya, Ibu Nova menegaskan bahwa pembangunan Zona Integritas bukan hanya simbol, melainkan sebuah wujud nyata dari pelayanan yang transparan, akuntabel, dan bebas korupsi. Ia menekankan bahwa keterlibatan para stakeholders, termasuk APH, sangat penting dalam memperkuat sistem pengawasan dan menjaga kredibilitas pelaksanaan anggaran negara.

Tak hanya itu, Ibu Nova juga membagikan kiat-kiat sukses dalam membangun Zona Integritas berdasarkan indikator penilaian dari Kementerian PAN-RB. Tips tersebut mencakup strategi perbaikan layanan, manajemen risiko, serta penguatan budaya kerja berbasis integritas di lingkungan KPPN.

Kegiatan ini menjadi bukti bahwa sinergi antara instansi pemerintah dan aparat penegak hukum adalah kunci dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang bersih, transparan, dan berintegritas tinggi.



### 3. Press Release APBN

Sebagai bentuk komitmen terhadap transparansi pengelolaan keuangan negara, KPPN Pematang Siantar secara rutin menyelenggarakan kegiatan press release APBN setiap bulan. Kegiatan ini dilaksanakan secara kolaboratif bersama unit vertikal Kementerian Keuangan lainnya yang tergabung dalam sinergi Kemenkeu Satu di Kota Pematangsiantar, yaitu KPP Pratama Pematang Siantar, KPPBC TMP Pematang Siantar, dan KPKNL Pematang Siantar.

Melalui forum ini, masyarakat dan pemangku kepentingan dapat memperoleh informasi terkini mengenai realisasi pendapatan dan belanja negara di wilayah kerja Kota Pematangsiantar dan Kabupaten Simalungun. Data yang disampaikan tidak hanya memberikan gambaran tentang kinerja fiskal, tetapi juga memperkuat akuntabilitas pemerintah dalam mengelola APBN secara terbuka.

Lebih dari sekadar penyampaian data, kegiatan press release ini juga dimanfaatkan oleh KPPN Pematang Siantar untuk terus menanamkan nilai-nilai integritas dan semangat antikorupsi. Setiap sesi menjadi pengingat bahwa pengelolaan keuangan negara harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, jujur, dan berorientasi pada pelayanan publik yang bersih dan profesional.

**Data Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)**  
Layanan KPKNL Pematangsiantar s.d. 31 Mei 2025  
KPPN Pematangsiantar

	s.d. April	s.d. Mei	%
<b>BP Pengelolaan BMN</b>			
Pemanfaatan BMN	Rp112.917.309,-	Rp181.437.861,-	60,68%
Pemindahtanganan BMN	Rp102.004.150,-	Rp570.469.250,-	459%
Rampasan	Rp42.356.950,-	Rp42.356.950,-	0%
<b>BP Lelang (Bea Lelang)</b>			
Pogadaian	Rp299.427.784,-	Rp346.456.464,-	16,09%
Pejabat Lelang Kelas I	Rp3.250.025.640,-	Rp3.322.539.122,-	2,07%
<b>BP Piutang Negara</b>			
BP Piutang Negara	Rp23.719,-	Rp48.428,-	104%
<b>TOTAL</b>	<b>Rp3.810.755.352,-</b>	<b>Rp4.347.765.713,-</b>	<b>14,09%</b>

**EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN**  
s.d. Mei 2025  
Pematang Siantar, 19 s.d. Mei 2025

INDONESIAN TREASURY

**DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI**

**BEA DAN CUKAI PEMATANGSIANTAR**

#### 4. Service Excellent

Untuk memastikan layanan terbaik dan meningkatkan kualitas layanan kepada stakeholders, KPPN Pematang Siantar bekerja sama dengan pihak perbankan menyelenggarakan kegiatan service excellent bagi seluruh pegawai KPPN Pematang Siantar. Pada Triwulan II 2025, KPPN Pematang Siantar bekerja sama dengan Bank BTN KC Pematang Siantar melaksanakan kegiatan Pelatihan Service Excellent Periode Triwulan II 2025 dengan narasumber adalah Customer Service Bank BTN KC Pematang Siantar, Bapak Samuel Simanjuntak. Pelatihan ini penting dilakukan secara periodikal untuk selalu memastikan kualitas pelayanan yang diberikan oleh KPPN Pematang Siantar kepada para stakeholder, terutama Satuan Kerja dan Pemerintah Daerah sebagai mitra kerja KPPN Pematang Siantar.

#### 5. Capacity Building

Kegiatan capacity building menjadi salah satu upaya strategis KPPN Pematang Siantar dalam memperkuat kerja sama, sinergi, dan kolaborasi antarpegawai serta antarunit kerja, baik di tingkat seksi maupun subbagian. Melalui kegiatan ini, diharapkan tercipta suasana kerja yang lebih solid, harmonis, dan produktif, yang pada akhirnya berdampak positif terhadap peningkatan kualitas kinerja seluruh bagian.

Pada Triwulan II tahun 2025, kegiatan capacity building KPPN Pematang Siantar mengusung tema “Bangun Kompetensi, Tingkatkan Prestasi – Unggul, Inovatif, Berintegritas.” Tema ini mencerminkan semangat untuk terus berkembang dan memberikan kontribusi terbaik melalui peningkatan kapasitas individu maupun tim, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai integritas dan inovasi dalam setiap langkah kerja.





### 6. Pembinaan Mental Pegawai

KPPN Pematang Siantar secara konsisten melaksanakan kegiatan pembinaan mental (bintal) setiap triwulan sebagai bagian dari upaya menjaga dan meningkatkan kesehatan mental para pegawai. Kegiatan ini menjadi ruang refleksi sekaligus penguatan nilai-nilai positif yang mendukung kinerja pegawai secara berkelanjutan.

Pada Triwulan II tahun 2025, materi pembinaan mental difokuskan pada penguatan kompetensi melalui tema “Integritas dalam Bekerja – Bangun Kompetensi, Tingkatkan Prestasi: Unggul, Inovatif, Berintegritas.” Melalui tema ini, diharapkan setiap pegawai mampu membangun kesadaran akan pentingnya integritas sebagai fondasi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sehari-hari.

Selain kegiatan triwulanan, KPPN Pematang Siantar juga secara rutin mengadakan pembinaan rohani setiap bulan bagi seluruh pegawai, baik dalam bentuk Bintal Rohani Islam maupun Bintal Rohani Kristiani. Kegiatan ini menjadi sarana untuk memperkuat ketenangan batin, memperdalam nilai spiritual, serta menjaga keseimbangan antara aspek profesional dan pribadi dalam kehidupan kerja.



### 7. Monitoring dan Evaluasi Keberlanjutan Pembangunan Zona Integritas

Salah satu kegiatan yang dilakukan rutin setiap bulan adalah monitoring dan evaluasi keberlanjutan pembangunan zona integritas. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pembangunan zona integritas terus berlanjut setelah mendapat predikat WBBM serta memastikan seluruh kegiatan telah dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan bagi stakeholders dan menjaga nilai integritas, antikorupsi, dan antigratifikasi dalam memberikan layanan kepada stakeholders.



# Tugu Raja Sang Nauluh Damanik, Ikon Baru Kota Pematangsiantar

*Oleh Anggiat Tambunan, Pranata Keuangan APBN*



**Hallo, Sobat Intress, kali ini kita akan membahas mengenai ikon baru Kota Pematangsiantar, Tugu Raja Sang Nauluh Damanik.**

Tugu ini diresmikan pada tanggal 24 April 2025, bertepatan dengan HUT Kota Pematangsiantar yang ke-154 oleh Walikota Pematangsiantar, Bapak Wesly Silalahi S.H, MKn. Tugu Raja Sang Nauluh terletak di Jalan Sang Nauluh, Kecamatan Siantar Timur, di sebelah Taman Makam Pahlawan (TMP) Nagur. Pembangunan tugu ini sudah direncanakan sejak tahun 2011 oleh Walikota saat itu, Bapak Hulman Sitorus, dan disepakati lokasi pembangunan Tugu Raja Sang Nauluh terletak di jalan Sang Nauluh, Siantar Timur.

Pada tahun 2012, dilakukan peletakan batu pertama yang dilakukan secara seremonial yang dihadiri oleh para pejabat dan tokoh adat Simalungun. Namun, seiring berjalannya waktu terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan pembangunan tugu ini sehingga proses pembangunannya menjadi terhambat.

Pada tahun 2018, Walikota yang baru, Bapak Hefriansyah, menganggarkan kembali pembangunan tugu ini dan lokasinya dipindahkan ke Lapangan H. Adam Malik. Namun, kembali terdapat hambatan sehingga proses pembangunan kembali terhenti. Pada tahun 2024, oleh Walikota Ibu Susanti Dewayani, dilaksanakan kembali pembangunan tugu ini di Jalan Sang Nauluh hingga akhirnya selesai pada tahun 2025.

## .....Tugu Raja Sang Nualuh Damanik,Ikon Baru Kota Pematangsiantar

Lantas, siapa Sang Nualuh itu? Tuan Sang Nualuh Damanik lahir di Pematangsiantar pada tanggal 24 April 1857 dan merupakan Raja Siantar yang ke-XIV. Tuan Sang Nualuh memimpin kerajaan Siantar dari tahun 1882 sampai dengan 1904. Selama menjadi raja, Sang Nualuh sangat gigih berjuang melawan penjajahan bangsa Belanda. Raja Tuan Sang Nualuh menolak untuk menandatangani pernyataan takluk dan menyerah kepada Belanda, yang dikenal dengan Korte Verklaring. Akibat penolakan itu, Raja Sang Nualuh ditangkap oleh Belanda dan diasingkan ke Pulau Bengkalis. Atas jasanya melawan penjajahan Belanda, hari lahir Raja Tuan Sang Nualuh Damanik ditetapkan sebagai hari jadi Kota Pematangsiantar.

Jadi, jika Sobat Inress mempunyai kesempatan untuk berkunjung atau berlibur ke Kota Pematangsiantar, mari kunjungi Tugu Raja Tuan Sang Nualuh Damanik. Silakan abadikan momen Sobat Inress dan tandai akun media sosial KPPN Pematang Siantar.



E	S	N	U	A	I	A	G	O	V	M	A	R	T
S	P	A	N	I	N	T	S	I	M	S	T	R	E
O	D	M	I	S	N	A	R	I	A	S	T	G	C
R	E	I	I	A	E	T	N	N	M	O	M	I	O
D	J	P	B	T	D	S	E	T	O	I	S	T	N
A	T	G	M	I	I	M	A	R	K	P	P	N	O
M	R	E	E	R	G	E	S	E	O	S	K	E	M
I	E	M	I	G	I	N	R	S	L	Y	I	T	I
R	A	A	E	E	P	T	E	S	R	E	I	I	S
C	S	C	R	T	A	O	V	P	Y	A	R	N	T
N	U	R	S	N	Y	R	E	G	I	O	N	A	L
I	R	N	N	I	A	R	A	T	N	A	I	S	T
I	Y	I	C	O	L	G	T	S	O	I	E	P	I
W	I	S	E	N	R	T	R	S	R	E	G	R	A

**TREASURY  
SPANINT  
INTRESS  
SIANTAR**

**KPPN  
WISE  
INCRIMA**

**RELEASE  
ECONOMIST  
DIGIPAY**

**REGIONAL  
INTEGRITAS  
DJPB  
GOVMART**



**Caranya?**

1. follow IG @kppn.pematangsiantar
2. kirim jawaban kamu melalui Direct Message (DM) ke @kppn.pematangsiantar
3. jawaban dapat berupa gambar/tangkapan layar/tulisan
- 4.3 (tiga) peserta tercepat dan tepat akan mendapatkan hadiah menarik
5. pemenang akan diumumkan pada edisi berikutnya
6. TTS tidak dipungut biaya apa pun



# Galeri Kegiatan Bulan Mei



9 Mei

Olahraga Bersama - Jalan Santai

9 Mei

Dison Tabo "Memanfaatkan Kecerdasan Buatan (AI) Untuk Transformasi Pemerintahan"



16 Mei

Olahraga Bersama - Voli



# Galeri Kegiatan Bulan Mei



22 Mei

Dison Tabo

20 Mei

Kemenkeu Satu lingkup Kota Pematangsiantar memperingati Hari Kebangkitan Nasional dalam semangat memajukan Indonesia



15 Mei

Kegiatan Sortali (Sharing Our Reaction and Talking About Integrity) dengan narasumber Kepala KPPN Pematang Siantar, Ibu Nova Juliana Sianturi



# Galeri Kegiatan Bulan Mei



22 Mei

Monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran satker Polres Simalungun

19 Mei

Monev Pelaksanaan Anggaran, Digitalisasi Pembayaran, Pembinaan Pejabat Perbendaharaan dan Pengendalian Retur SP2D Periode Triwulan II Tahun 2025 ke Badan Pusat Statistik Kota Pematang Siantar



22 Mei

Service Excellence dan Refreshment Cash Management Triwulan II Tahun 2025



# Galeri Kegiatan Bulan Mei



23 Mei

Olahraga Bersama - Senam

20 Mei

Monev Pelaksanaan Anggaran, Digitalisasi Pembayaran, Pembinaan Pejabat Perbendaharaan dan Pengendalian Retur SP2D Periode Triwulan II Tahun 2025 ke Lapas Pematang Siantar



22 Mei

Asistensi Laporan Keuangan dan Asistensi SAKTI : Interkoneksi Digipay dengan Aplikasi SAKTI Periode Mei 2025



# Galeri Kegiatan Bulan Mei



23 Mei

Bintal Kompetensi

27 Mei

Kegiatan Press Release APBN dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Satker K/L Periode s.d. April 2025, Asistensi Aplikasi SAKTI dan Digitalisasi Pembayaran serta Sosialisasi Zero Retur SP2D Periode Mei 2025



23 Mei

Monitoring Penyaluran TKD dan Evaluasi Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa tahun 2025



# Galeri Kegiatan Bulan Mei



28 Mei

Olahraga Bersama - Jalan Santai

21 Mei

Rapat WBBM Bulan Mei



23 Mei

Capacity Building Triwulan II



# Galeri Kegiatan Bulan Juni



1 Juni

Upacara Hari Lahir Pancasila di  
Kanwil DJP Sumut II

4 Juni

Dison Tabo “Lindungi Bumi”



4 Juni

Monev Pelaksanaan Anggaran, Digitalisasi  
Pembayaran, Pembinaan Pejabat  
Perbendaharaan dan Pengendalian Retur SP2D  
Periode Triwulan II Tahun 2025 ke Rumkit TK.IV  
01.07.01



# Galeri Kegiatan Bulan Juni



5 Juni

Monev Pelaksanaan Anggaran, Digitalisasi Pembayaran, Pembinaan Pejabat Perbendaharaan dan Pengendalian Retur SP2D Periode Triwulan II Tahun 2025 ke Kantor Imigrasi Pematang Siantar

5 Juni

Olahraga Bersama - Senam



10 Juni

Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Dana Desa tahun 2025 di DPMN Kab. Simalungun



# Galeri Kegiatan Bulan Juni



12 Juni

Dison Tabo - Perfume - Seni di Balik Aroma

17 Juni

Refreshment Pengelolaan Keuangan Daerah dengan mengundang narasumber dari Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematangsiantar



19 Juni

Sortali Bulan Juni



# Galeri Kegiatan Bulan Juni

**18 Juni**

**Kegiatan Press Release APBN dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Satker K/L Periode s.d. Mei 2025, Asistensi Aplikasi SAKTI dan Digitalisasi Pembayaran serta Sosialisasi Zero Retur SP2D Periode Juni 2025**



**20 Juni**

**Olahraga Bersama - Jalan Santai**



# Galeri Kegiatan Bulan Juni



20 Juni

Ibadah Bintal Islam Bulanan KPPN Pematang Siantar

20 Juni

Ibadah Bintal Bulanan Kristen



24 Juni

Sosialisasi Peraturan, Evaluasi Pelaksanaan Anggaran, Reviu Pelaksanaan Anggaran (RPA), Spending Review, dan Sosialisasi Antikorupsi/Antigratifikasi Satker Mitra Kerja KPPN Pematang Siantar





KPPN PEMATANG SIANTAR  
Jl. Rajamin Purba No.119, Kota Pematangsiantar,  
Prov. Sumatera Utara